



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.01/MENKES/033/I/2010  
TENTANG  
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN  
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu adanya dukungan dana pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010**
- Kedua : Alokasi dana Dekonsentrasi di Provinsi dimaksud Diktum Kesatu adalah untuk:
1. Program Lingkungan Sehat;
  2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  3. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
  4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
  6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
  8. Program Sumber Daya Kesehatan;
  9. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- Ketiga : Alokasi dana Tugas Pembantuan di Provinsi dimaksud Diktum Kesatu adalah untuk:
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
  2. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
  3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  4. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- Keempat : Alokasi dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota adalah untuk:
1. Program Lingkungan Sehat;
  2. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
  3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

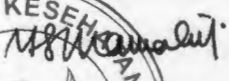


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima : Ruang lingkup kegiatan untuk masing-masing program dimaksud Diktum Kedua, Diktum Ketiga dan Diktum Keempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Keenam : Rincian alokasi anggaran masing-masing program dimaksud Diktum Kedua, Diktum Ketiga dan Diktum Keempat untuk setiap Satuan Kerja tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini,
- Ketujuh : Anggaran Program dan Kegiatan dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi;
- Kedelapan : Anggaran Program dan Kegiatan dimaksud pada Diktum Keempat dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Kesembilan : Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 024 - Kementerian, Departemen Kesehatan Tahun 2010.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 11 Januari 2010

MENTERI KESEHATAN R.I.

  
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
8. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan
9. Para Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan
10. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
12. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN-I

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : HK.03.01/MENKES/033/I/2010  
TANGGAL : 11 JANUARI 2010

**RUANG LINGKUP KEGIATAN  
MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN**

**I. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Rp. 141.262.371.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Lingkungan Sehat di daerah tahun 2010 disediakan dana sebesar Rp. 141.262.371.000,- yang terdiri dari **dana Dekonsentrasi** sebesar Rp. 51.074.545.000,- dan **dana Tugas Pembantuan** sebesar Rp. 90.187.826.000,- pada Lampiran II.

**Dana Dekonsentrasi** dialokasikan kepada 15 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Papua Barat dan Sulawesi Barat) yang melaksanakan Proyek Pamsimas dan 6 Provinsi (Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung dan Sulawesi Barat) yang melaksanakan Proyek WSLIC-II, dengan tujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai sanitasi total berbasis masyarakat di 10.000 desa sampai tahun 2013.

Sedangkan **Dana Tugas Pembantuan** dialokasi kepada 27 Kabupaten di 6 Provinsi lokasi Proyek CWSH dalam rangka Penyediaan Sarana Air Bersih di Pedesaan serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai sanitasi total berbasis masyarakat.

**II. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Rp. 16.500.000.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan di daerah pada tahun 2010 disediakan **dana Dekonsentrasi** sebesar Rp. 16.500.000.000,- , pada Lampiran II.

Kegiatan yang dibiayai dari Dana dekonsentrasi utamanya untuk 1) monitoring ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota; 2) advokasi manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota; 3) sampling alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 4) monitoring dan evaluasi iklan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 5) biaya operasional instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota; dan 6) Bimbingan teknis pelaksanaan DAK, program obat dan perbekalan kesehatan.

Di samping itu, terdapat menu tambahan yang dapat dipilih apabila kegiatan pada menu wajib telah terakomodir atau tersedia anggaran pada APBD; 1) Sosialisasi software



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

dinamika obat di PBF dan software narkotika dan psikotropika (SIPNAP); 2) peningkatan kapasitas SDM manajemen logistik obat di Puskesmas; 3) peningkatan kapasitas SDM tentang manajemen logistik obat bencana; 4) sosialisasi software ketersediaan obat kabupaten/kota; 5) pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan POR bagi tenaga kesehatan kab/kota Puskesmas di Provinsi; 6) pembekalan penggunaan obat rasional bagi tenaga kesehatan kab/kota di Provinsi; 7) evaluasi dan implementasi daftar obat esensial nasional (DOEN) di sarana pelayanan kesehatan; 8) monitoring pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apotek dan RS; 9) pilot Project pelayanan kefarmasian di Apotek, Puskesmas dan RS; 10) pelatihan tenaga kefarmasian di komunitas dan RS; dan 11) Sosialisasi *Good Pharmacy Practice* (GPP).

**III. PROGRAM UPAYA KESEHATAN  
PERORANGAN**

**Rp. 870.800.000.000,-**

Untuk penyelenggaraan Program Upaya Kesehatan Perorangan di daerah tahun 2010 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 6.600.000.000,- dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 864.200.000.000,- pada Lampiran II.

Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk mencapai sasaran Program Upaya Kesehatan Perorangan, yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit/laboratorium kesehatan daerah, dengan memperhatikan menu wajib dan atau menu pilihan.

**Menu Wajib** adalah 1) pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran UKP antara Ditjen Bina Pelayanan Medik dengan Dinas Kesehatan Provinsi, 2) pertemuan konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran UKP antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit dan Labkes daerah di wilayah binaan, 3) pertemuan Konsolidasi Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Program UKP antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit dan Labkes daerah di wilayah binaan.

**Menu Pilihan** (Menu Direktorat) adalah 1) Pertemuan advokasi & sosialisasi kebijakan program UKP oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinkes Kabupaten / Kota dan sarana kesehatan di daerah binaannya, 2) Monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sarana kesehatan di daerah binaannya, 3) Pelatihan teknis dalam pemeliharaan peralatan di Rumah Sakit dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi bersama Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan dengan RS/Labkes.

Untuk menyelenggarakan Program Upaya Kesehatan Perorangan di Kabupaten/Kota Tahun 2010 disediakan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 610.000.000.000,-.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**IV. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Rp. 47.330.000.000,-**

Dalam penyelenggaraan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di daerah tahun 2010 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 47.330.000.000,- pada Lampiran II.

Penggunaan dana Dekonsentrasi diarahkan untuk 1) Menumbuhkan gerakan dan kemandirian masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko/permasalahan kesehatan yang ada dalam lingkungan desanya, yang difokuskan kepada (1) penguatan kelembagaan desa siaga melalui (a) penguatan/Pembentukan forum koordinasi antar lintas sektor dan program di provinsi dan kabupaten/kota, (b) penggalangan kemitraan dengan Swasta/LSM, 2) Penyebaran informasi kesehatan, 3) Penggerakan dan pengorganisasian masyarakat melalui orientasi pengembangan desa siaga bagi kader dan tokoh masyarakat; untuk provinsi yang belum menyelesaikan target pengembangan desa siaga, 4) Memfasilitasi masyarakat dengan pengetahuan untuk menciptakan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya dengan menggali seluruh potensi yang mereka miliki melalui (1) Penyebaran informasi kesehatan, dan (2) Pengembangan pendekatan-pendekatan spesifik daerah, 5) Peningkatan Kapasitas Promosi Kesehatan yang diarahkan kepada (1) penguatan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi program melalui, (a) koordinasi Perencanaan dan Evaluasi dengan Kabupaten/Kota, (b) Pembinaan/ Fasilitasi Teknis kepada Kabupaten/Kota, dan (c) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan, dan (2) peningkatan SDM Promosi Kesehatan, 6) Penyediaan Honorarium dan Operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan dekonsentrasi.

**V. PROGRAM UPAYA KESEHATAN  
MASYARAKAT**

**Rp. 2.010.657.340.000,-**

Dalam Rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi/Balita melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan di daerah tahun 2010 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp 285.600.165.000 ,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni sebesar Rp. 201.824.400.000 -, DHS 2 Rp 82.420.245.000 (RM Rp 732.730.000, RMP Rp 20.772.035.000, Pinjaman Luar Negeri Rp. 60.915.480.000), HSSP Rp. 1.355.520.000 (RM), dan dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp.7.000.000.000,- (RM) pada Lampiran II.

Dana Dekonsentrasi utamanya diarahkan untuk 1) melanjutkan kegiatan prioritas 2009 melalui berbagai terobosan dan akselerasi kegiatan 2010, dan 2) meningkatkan kemitraan dan sinergisme pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat

Dana tersebut disediakan untuk 1) **Pelayanan Kesehatan Ibu** dengan kegiatan utama (a) P4K dengan stiker dan buku KIA, (b) Kemitraan Bidan dan Dukun, (c) Pengembangan Poned, Ponek dan UTD, (d) Pelayanan KB berkualitas, (e) Pelayanan kesehatan Reproduksi terpadu, dan (f) Pengarustamaan Gender bidang kesehatan, 2) **Pelayanan Kesehatan Anak**, dengan kegiatan utama (a) Pelatihan MTBS, (b) Pelayanan neonatus dengan komplikasi, (c) Yankes Bayi dan balita, dan (d) Yankes Anak Sekolah, Remaja dan Anak khusus, 3) **Pelayanan Kesehatan Komunitas** dengan kegiatan utama (a) Revitalisasi Puskesmas, (b) Yankes DTPK, (c) Dukungan Inpres (Papua, Sulteng, Kalteng), (d) Pengembangan UPT



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kesmas, dan (e) Pengembangan yankes prioritas lainnya, 4) **Pelayanan Kesehatan Kerja** dengan kegiatan utamanya (a) Tempat – tempat kerja menerapkan upaya kesehatan kerja dan (b) Sarana pelayanan kesehatan melaksanakan kesehatan kerja, 5) **Pelayanan Kesehatan Masyarakat** dengan kegiatan utamanya (a) Jamkesmas, (b) Operasional Puskesmas, (c) Pengembangan desa siaga/Operasional Poskesdes, (d) Pengembangan Poskestren dan (f) Dukungan Sarana dan Prasarana.

**VI. PROGRAM PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYAKIT**

**Rp. 35.300.000.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit di daerah tahun 2010 disediakan **dana Dekonsentrasi** sebesar Rp. 9.900.000.000,- yang prioritas penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan SKD KLB dan investigasi KLB, pada Lampiran II.

Sedangkan **dana Tugas Pembantuan** sebesar Rp. 25.400.000.000,- dialokasikan kepada beberapa provinsi/kabupaten sebagai dana stimulus untuk kegiatan pasca bencana dan pencegahan dan pemberantasan khususnya flu burung; pada Lampiran II.

**VII. PROGRAM PERBAIKAN GIZI  
MASYARAKAT**

**Rp. 393.195.789.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di daerah pada tahun 2010 disediakan **dana Dekonsentrasi** sebesar Rp 164.176.000.000,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni sebesar Rp 49.600.000.000,- , Dana Rupiah Murni Pendamping Rp 15.039.000.000,- dan dana Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 99.537.000.000,- untuk proyek NICE Project ADB Loan No. 2348-INO (SF), pada Lampiran II.

**Dana Dekonsentrasi** digunakan utamanya untuk kegiatan 1) Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk, 2) Penanggulangan dan perbaikan gizi, dan 3) Peningkatan pendidikan gizi.

**Dana Dekonsentrasi** tersebut digunakan untuk kegiatan 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (Renja-KL, RKA-KL, SRAA dan DIPA); 2) Pengolahan data program gizi; 3) Penanggulangan kurang vitamin A (KVA); 4) Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY); 5) Penanggulangan anemia gizi besi; 6) Penanggulangan kurang energi protein (KEP); 7) Pemantauan status gizi balita; 8) Pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu; 9) Penyebarluasan informasi kesehatan dan gizi menuju keluarga sadar gizi (Kadarzi); 10) Peningkatan penggunaan air susu ibu (ASI) dan 11) Monitoring dan evaluasi program perbaikan gizi.

**VIII. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN**

**Rp. 52.432.419.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Sumber Daya Kesehatan di daerah pada tahun 2010 disediakan **dana dekonsentrasi** sebesar Rp. 52.432.419.000,- pada Lampiran II.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Dana Dekonsentrasi tersebut digunakan untuk membiayai 1) Pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan manajerial untuk bidan/fasilitator untuk pengembangan desa siaga, petugas pemeriksa kesehatan jemaah calon haji Tahap I dan II serta Poskestren, 2) Penyusunan Profil Sumber Daya Kesehatan yang meliputi kegiatan administrasi, persiapan, pemutakhiran data, pengolahan data, pengumpulan data dan supervisi serta finalisasi, 3) Bantuan Beasiswa pada jenjang D1, D3, D4 dan S1 untuk lanjutan dan baru, serta S2 dan S3 untuk lanjutan. Khusus untuk Tugas Belajar baru Tahun 2010 diutamakan yang bekerja di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, 4) Administrasi Kegiatan dan manajemen PPSDM Kesehatan, 5) Penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan 6) Pengadaan alat pengolahan data.

Tujuan kegiatan tersebut di atas adalah untuk 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan program dalam menunjang komitmen global (Millenium Development Goals (MDGs), prioritas nasional dan program spesifik di daerah, 2) Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM Kesehatan di Puskesmas, RS, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, 3) Terselenggaranya tugas belajar bagi PNS daerah, dan 4) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen kesehatan.

IX. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN

Rp. 182.606.100.000,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan di daerah pada tahun 2010 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 67.606.100.000,- dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 115.000.000.000,- pada Lampiran II.

Dana Dekonsentrasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (Renja-KL bahan Musrenbang, RKA-KL dan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan), 2) Penyusunan, pengolahan dan analisis serta pemutakhiran data profil provinsi, updating data puskesmas, visualisasi Puskesmas, visualisasi Rumah Sakit, penyusunan dan pengolahan dan analisa SIK Kab/Kota, pendidikan dan latihan (WEB, Database, GIS, Survei Cepat) dan ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) serta pencetakan profil provinsi dan pencetakan SIK Kab/Kota, 3) percepatan pembayaran gaji dan insentif tenaga PTT pusat, 4) pengelolaan keuangan Satker dan kegiatan lain dalam penyusunan laporan keuangan (Neraca, LAK, CaLK), 5) penyusunan evaluasi kinerja (PP No. 39 Th. 2006), penyusunan laporan monitoring dan evaluasi DAK, penyusunan profil kesehatan (Provinsi dan Kabupate/Kota), dan evaluasi SPM Bidang Kesehatan, dan 6) operasional dan honorarium tim koordinasi Jamkesmas tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Dana Tugas Pembantuan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan akselerasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bersifat komprehensif maupun simultan.

MENTERI KESEHATAN R.I.



*Endang Rahayu Sedyaningsih*  
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN - II  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.  
NOMOR : HK.03.01/MENKES/033/I/2010  
TANGGAL : 11 JANUARI 2010

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN UNTUK MASING-MASING  
PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2010

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
I	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT	-	7,023,232	43,602,793	448,520	51,074,545	-	21,340,900	55,070,502	13,776,424	90,187,826	141,262,371
A.	DINAS KESEHATAN PROVINSI	-	7,023,232	43,602,793	448,520	51,074,545	-	-	-	-	-	51,074,545
1	Dinkes prop. Jawa barat	0	767,900	2,389,210	-	3,166,110						3,166,110
2	Dinkes Prov. Jawa Tengah	-	434,840	9,874,600	-	10,309,440						10,309,440
3	Dinkes Prov. NAD	-	51,480	-	448,520	500,000						500,000
4	Dinkes Prov. Sumatera Utara	-	65,340	366,710	-	432,050						432,050
5	Dinkes Prov. Sumatera Barat	-	234,620	5,065,350	-	5,299,970						5,299,970
6	Dinkes Prov. Riau	-	113,180	2,394,240	-	2,507,420						2,507,420
7	Dinkes Prov. Jambi	-	273,020	299,040	-	572,060						572,060
8	Dinkes Prov. Sumatera Selatan	-	505,780	2,938,670	-	3,444,450						3,444,450
9	Dinkes Prov. Kalimantan barat	-	363,684	519,990	-	883,674						883,674
10	Dinkes Prov. Kalimantan Tengah	-	282,736	171,864	-	454,600						454,600
11	Dinkes Prov. Kalimantan Selatan	-	139,780	2,742,400	-	2,882,180						2,882,180
12	Dinkes Prov. Sulawesi Tengah	-	127,310	2,681,800	-	2,809,110						2,809,110
13	Dinkes Prov. Sulawesi Selatan	-	851,100	3,310,110	-	4,161,210						4,161,210
14	Dinkes Prov. Maluku	-	44,850	500,800	-	545,650						545,650
15	Dinkes Prov. Nusa Tenggara Barat	-	1,050,820	1,181,170	-	2,232,090						2,232,090
16	Dinkes Prov. Nusa Tenggara Timur	-	187,580	4,124,050	-	4,311,630						4,311,630
17	Dinkes Prov. Bengkulu	-	337,912	384,366	-	722,278						722,278
18	Dinkes Prov. Maluku Utara	-	57,820	709,008	-	766,828						766,828
19	Dinkes Prov. Banten	-	57,620	673,005	-	730,625						730,625
20	Dinkes Prov. Bangka Belitung	-	362,800	207,320	-	569,920						569,920
21	Dinkes Prov. Gorontalo	-	73,310	1,007,000	-	1,080,310						1,080,310
22	Dinkes Prov. Papua Barat	-	44,760	530,400	-	575,160						575,160
23	Dinkes Prov. Sulawesi Barat	-	595,080	1,522,690	-	2,117,770						2,117,770



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

*(Dalam Ribuan Rupiah)*

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
<b>B</b>	<b>DINAS KESEHATAN KAB/KOTA</b>	-	-	-	-	-	-	21,340,900	55,070,502	13,776,424	90,187,826	90,187,826
1	Dinkes Kab. Pidie	-	-	-	-	-	-	83,060	-	3,090,556	3,173,616	3,173,616
2	Dinkes Kab. Aceh Utara	-	-	-	-	-	-	74,660	-	2,778,113	2,852,773	2,852,773
3	Dinkes Kab. Bireun	-	-	-	-	-	-	58,920	-	701,827	760,747	760,747
4	Dinkes Kab. Aceh Jaya	-	-	-	-	-	-	76,400	-	3,179,096	3,255,496	3,255,496
5	Dinkes Kab. Nagan Raya	-	-	-	-	-	-	63,900	-	3,407,582	3,471,482	3,471,482
6	Dinkes Kab. Nias	-	-	-	-	-	-	114,840	-	385,240	500,080	500,080
7	Dinkes Kab. Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	62,400	-	234,010	296,410	296,410
8	Dinkes Kab. Batang Hari	-	-	-	-	-	-	1,039,000	2,536,000	-	3,575,000	3,575,000
9	Dinkes Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	1,039,000	2,536,000	-	3,575,000	3,575,000
10	Dinkes Kab. Bungo	-	-	-	-	-	-	1,039,000	2,536,000	-	3,575,000	3,575,000
11	Dinkes Kab. Sarolangun	-	-	-	-	-	-	1,039,000	2,536,000	-	3,575,000	3,575,000
12	Dinkes Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-	1,039,000	2,536,000	-	3,575,000	3,575,000
13	Dinkes Kab. Sambas	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
14	Dinkes Kab. Sanggau	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
15	Dinkes Kab. Sintang	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
16	Dinkes Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
17	Dinkes Kab. Ketapang	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
18	Dinkes Kab. Landak	-	-	-	-	-	-	1,034,000	3,044,000	-	4,078,000	4,078,000
19	Dinkes Kab. Kapuas	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
20	Dinkes Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
21	Dinkes Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	883,600	1,826,400	-	2,710,000	2,710,000
22	Dinkes Kab. Katingan	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
23	Dinkes Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	758,600	1,826,400	-	2,585,000	2,585,000
24	Dinkes Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	-	1,019,800	2,435,200	-	3,455,000	3,455,000
25	Dinkes Kab. Bengkulu Utara	-	-	-	-	-	-	1,039,000	2,536,000	-	3,575,000	3,575,000
26	Dinkes Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-	-	-	976,500	2,536,000	-	3,512,500	3,512,500
27	Dinkes Kab. Rejang Lebong	-	-	-	-	-	-	1,039,000	2,536,000	-	3,575,000	3,575,000
28	Dinkes Kab. Bekasi	-	-	-	-	-	-	244,317	2,145,440	-	2,389,757	2,389,757
29	Dinkes Kab. Karawang	-	-	-	-	-	-	244,317	2,145,440	-	2,389,757	2,389,757
30	Dinkes Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	214,186	1,878,022	-	2,092,208	2,092,208
<b>II</b>	<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	16,500,000	-	-	-	16,500,000	-	-	-	-	-	16,500,000
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	346,875	-	-	-	346,875	-	-	-	-	-	346,875
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	593,750	-	-	-	593,750	-	-	-	-	-	593,750



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

*(Dalam Ribuan Rupiah)*

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	678,125	-	-	-	678,125	-	-	-	-	-	678,125
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	396,875	-	-	-	396,875	-	-	-	-	-	396,875
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	756,250	-	-	-	756,250	-	-	-	-	-	756,250
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh D.	515,625	-	-	-	515,625	-	-	-	-	-	515,625
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	659,375	-	-	-	659,375	-	-	-	-	-	659,375
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	528,125	-	-	-	528,125	-	-	-	-	-	528,125
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	412,500	-	-	-	412,500	-	-	-	-	-	412,500
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	453,125	-	-	-	453,125	-	-	-	-	-	453,125
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	490,625	-	-	-	490,625	-	-	-	-	-	490,625
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	531,250	-	-	-	531,250	-	-	-	-	-	531,250
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	531,250	-	-	-	531,250	-	-	-	-	-	531,250
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	481,250	-	-	-	481,250	-	-	-	-	-	481,250
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	521,875	-	-	-	521,875	-	-	-	-	-	521,875
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	431,250	-	-	-	431,250	-	-	-	-	-	431,250
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	490,625	-	-	-	490,625	-	-	-	-	-	490,625
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	503,125	-	-	-	503,125	-	-	-	-	-	503,125
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	625,000	-	-	-	625,000	-	-	-	-	-	625,000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	512,500	-	-	-	512,500	-	-	-	-	-	512,500
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	503,125	-	-	-	503,125	-	-	-	-	-	503,125
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	434,375	-	-	-	434,375	-	-	-	-	-	434,375
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	493,750	-	-	-	493,750	-	-	-	-	-	493,750
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	596,875	-	-	-	596,875	-	-	-	-	-	596,875
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	571,875	-	-	-	571,875	-	-	-	-	-	571,875
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	443,750	-	-	-	443,750	-	-	-	-	-	443,750
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	484,375	-	-	-	484,375	-	-	-	-	-	484,375
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	475,000	-	-	-	475,000	-	-	-	-	-	475,000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	365,625	-	-	-	365,625	-	-	-	-	-	365,625
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	456,250	-	-	-	456,250	-	-	-	-	-	456,250
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	365,625	-	-	-	365,625	-	-	-	-	-	365,625
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	403,125	-	-	-	403,125	-	-	-	-	-	403,125
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	446,875	-	-	-	446,875	-	-	-	-	-	446,875
III.	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN</b>	<b>6,600,000</b>	-	-	-	<b>6,600,000</b>	<b>864,200,000</b>	-	-	-	<b>864,200,000</b>	<b>870,800,000</b>
A.	<b>DINAS KESEHATAN PROVINSI</b>	<b>6,600,000</b>	-	-	-	<b>6,600,000</b>	-	-	-	-	-	<b>6,600,000</b>
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	383,223	-	-	-	383,223	-	-	-	-	-	383,223
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	508,101	-	-	-	508,101	-	-	-	-	-	508,101



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
3	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	87,280	-	-	-	87,280	-	-	-	-	-	87,280
4	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	544,293	-	-	-	544,293	-	-	-	-	-	544,293
5	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh D.	284,850	-	-	-	284,850	-	-	-	-	-	284,850
6	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	379,458	-	-	-	379,458	-	-	-	-	-	379,458
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	209,066	-	-	-	209,066	-	-	-	-	-	209,066
8	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	173,699	-	-	-	173,699	-	-	-	-	-	173,699
9	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	148,391	-	-	-	148,391	-	-	-	-	-	148,391
10	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	202,609	-	-	-	202,609	-	-	-	-	-	202,609
11	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	142,035	-	-	-	142,035	-	-	-	-	-	142,035
12	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	198,420	-	-	-	198,420	-	-	-	-	-	198,420
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	192,155	-	-	-	192,155	-	-	-	-	-	192,155
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	186,903	-	-	-	186,903	-	-	-	-	-	186,903
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	218,318	-	-	-	218,318	-	-	-	-	-	218,318
16	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	125,823	-	-	-	125,823	-	-	-	-	-	125,823
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	163,677	-	-	-	163,677	-	-	-	-	-	163,677
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	348,586	-	-	-	348,586	-	-	-	-	-	348,586
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	177,946	-	-	-	177,946	-	-	-	-	-	177,946
20	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	171,585	-	-	-	171,585	-	-	-	-	-	171,585
21	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	132,310	-	-	-	132,310	-	-	-	-	-	132,310
22	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	124,176	-	-	-	124,176	-	-	-	-	-	124,176
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	238,434	-	-	-	238,434	-	-	-	-	-	238,434
24	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	475,679	-	-	-	475,679	-	-	-	-	-	475,679
25	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	124,100	-	-	-	124,100	-	-	-	-	-	124,100
26	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	111,422	-	-	-	111,422	-	-	-	-	-	111,422
27	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	98,495	-	-	-	98,495	-	-	-	-	-	98,495
28	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	98,337	-	-	-	98,337	-	-	-	-	-	98,337
29	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	69,093	-	-	-	69,093	-	-	-	-	-	69,093
30	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	78,420	-	-	-	78,420	-	-	-	-	-	78,420
31	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	133,078	-	-	-	133,078	-	-	-	-	-	133,078
32	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	70,038	-	-	-	70,038	-	-	-	-	-	70,038
<b>B.</b>	<b>TUGAS PEMBANTUAN (MULTI-YEARS)</b>	-	-	-	-	-	<b>254,200,000</b>	-	-	-	<b>254,200,000</b>	<b>254,200,000</b>
1	RSU haji Surabaya	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000
2	RSU Dr. Soetomo Surabaya	-	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000
3	RSU Dr. Harjanto Ponorogo	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000
4	RSU Sunqal Dareh	-	-	-	-	-	49,200,000	-	-	-	49,200,000	49,200,000
5	RSU Kab. Samosir	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000

PER PROG PER STKR





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
6	RSUD Kab. Siantar						30,000,000				30,000,000	30,000,000
7	RSUD . Kab Simalungun						30,000,000				30,000,000	30,000,000
C.	TUGAS PEMBANTUAN (KABUPATEN/KOTA)	-	-	-	-	-	610,000,000	-	-	-	610,000,000	610,000,000
1.	Tugas pembantuan						610,000,000				610,000,000	610,000,000
IV.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47,330,000	-	-	-	47,330,000	-	-	-	-	-	47,330,000
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	750,000	-	-	-	750,000	-	-	-	-	-	750,000
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh D.	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	1,950,000	-	-	-	1,950,000	-	-	-	-	-	1,950,000
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	700,000
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-	1,700,000
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	1,250,000
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	650,000	-	-	-	650,000	-	-	-	-	-	650,000
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	950,000	-	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	2,050,000	-	-	-	2,050,000	-	-	-	-	-	2,050,000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	2,800,000
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	3,100,000	-	-	-	3,100,000	-	-	-	-	-	3,100,000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1,050,000	-	-	-	1,050,000	-	-	-	-	-	1,050,000
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,175,000	-	-	-	1,175,000	-	-	-	-	-	1,175,000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	1,350,000
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	950,000	-	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	1,625,000	-	-	-	1,625,000	-	-	-	-	-	1,625,000
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	750,000	-	-	-	750,000	-	-	-	-	-	750,000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	980,000	-	-	-	980,000	-	-	-	-	-	980,000
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	1,400,000
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	550,000	-	-	-	550,000	-	-	-	-	-	550,000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	800,000
<b>V.</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>202,597,130</b>	<b>22,127,555</b>	<b>60,915,481</b>	<b>-</b>	<b>285,600,165</b>	<b>7,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,000,000</b>	<b>292,600,165</b>
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	3,393,471	-	-	-	3,393,471	-	-	-	-	-	3,393,471
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	11,321,324	-	-	-	11,321,324	-	-	-	-	-	11,321,324
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	12,426,884	-	-	-	12,426,884	-	-	-	-	-	12,426,884
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	4,479,710	-	-	-	4,479,710	-	-	-	-	-	4,479,710
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	16,941,029	-	-	-	16,941,029	-	-	-	-	-	16,941,029
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nangroe Aceh D.	6,330,047	-	-	-	6,330,047	-	-	-	-	-	6,330,047
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	8,239,844	-	-	-	8,239,844	-	-	-	-	-	8,239,844
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	5,933,094	-	-	-	5,933,094	-	-	-	-	-	5,933,094
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	5,529,498	-	-	-	5,529,498	-	-	-	-	-	5,529,498
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	4,676,914	-	-	-	4,676,914	-	-	-	-	-	4,676,914
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	6,007,791	1,954,275	8,639,105	-	16,611,171	-	-	-	-	-	16,611,171
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	5,807,959	-	-	-	5,807,959	-	-	-	-	-	5,807,959
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	8,239,807	-	-	-	8,239,807	-	-	-	-	-	8,239,807
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	4,997,138	2,342,315	6,429,765	-	13,769,218	5,000,000	-	-	-	5,000,000	18,769,218
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	5,896,237	2,060,596	7,602,340	-	15,359,173	-	-	-	-	-	15,359,173
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	5,034,327	-	-	-	5,034,327	-	-	-	-	-	5,034,327
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	4,229,242	-	-	-	4,229,242	-	-	-	-	-	4,229,242
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	9,592,345	-	-	-	9,592,345	2,000,000	-	-	-	2,000,000	11,592,345
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	7,782,565	3,482,958	11,874,008	-	23,139,531	-	-	-	-	-	23,139,531
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	5,327,671	-	-	-	5,327,671	-	-	-	-	-	5,327,671
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	4,995,926	-	-	-	4,995,926	-	-	-	-	-	4,995,926
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	4,281,448	-	-	-	4,281,448	-	-	-	-	-	4,281,448
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	5,228,842	3,030,953	5,339,068	-	13,598,863	-	-	-	-	-	13,598,863
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	6,052,268	4,300,262	5,671,393	-	16,223,923	-	-	-	-	-	16,223,923
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	7,721,333	-	-	-	7,721,333	-	-	-	-	-	7,721,333
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	3,676,972	-	-	-	3,676,972	-	-	-	-	-	3,676,972
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	4,373,275	-	-	-	4,373,275	-	-	-	-	-	4,373,275
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	4,855,615	-	-	-	4,855,615	-	-	-	-	-	4,855,615
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	3,988,936	1,584,288	5,199,903	-	10,753,126	-	-	-	-	-	10,753,126



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI				TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL	
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH		JUMLAH 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	3,536,501	1,474,199	4,393,860		9,404,560		-	-	-	-	9,404,560
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	3,953,599	-	-		3,953,599		-	-	-	-	3,953,599
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	3,972,322	-	-		3,972,322		-	-	-	-	3,972,322
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	3,955,196	1,867,709	5,566,039		11,408,944		-	-	-	-	11,408,944
VI.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT</b>	<b>9,900,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,900,000</b>	<b>25,400,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,400,000</b>	<b>35,300,000</b>
A.	<b>DINAS KESEHATAN PROVINSI</b>	<b>9,900,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,900,000</b>	<b>14,900,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,900,000</b>	<b>24,800,000</b>
1	Dinkes Prov. DKI Jakarta	300,000				300,000						300,000
2	Dinkes Prov. Jawa Barat	300,000				300,000						300,000
3	Dinkes Prov. Jawa Tengah	300,000				300,000						300,000
4	Dinkes Prov. D.I.Yogyakarta	300,000				300,000						300,000
5	Dinkes Prov. Jawa Timur	300,000				300,000						300,000
6	Dinkes Prov. NAD	300,000				300,000						300,000
7	Dinkes Prov. Sumatera Utara	300,000				300,000						300,000
8	Dinkes Prov. Sumatera Barat	300,000				300,000						300,000
9	Dinkes Prov. Riau	300,000				300,000						300,000
10	Dinkes Prov. Jambi	300,000				300,000						300,000
11	Dinkes Prov. Sumatera Selatan	300,000				300,000						300,000
12	Dinkes Prov. Lampung	300,000				300,000						300,000
13	Dinkes Prov. Kalimantan Barat	300,000				300,000						300,000
14	Dinkes Prov. Kalimantan Tengah	300,000				300,000						300,000
15	Dinkes Prov. Kalimantan Selatan	300,000				300,000						300,000
16	Dinkes Prov. Kalimantan Timur	300,000				300,000						300,000
17	Dinkes Prov. Sulawesi Utara	300,000				300,000						300,000
18	Dinkes Prov. Sulawesi Tengah	300,000				300,000						300,000
19	Dinkes Prov. Sulawesi Selatan	300,000				300,000						300,000
20	Dinkes Prov. Sulawesi Tenggara	300,000				300,000						300,000
21	Dinkes Prov. Maluku	300,000				300,000						300,000
22	Dinkes Prov. Bali	300,000				300,000						300,000
23	Dinkes Prov. Nusa Tenggara Barat	300,000				300,000						300,000
24	Dinkes Prov. Nusa Tenggara Timur	300,000				300,000						300,000
25	Dinkes Prov. Papua	300,000				300,000						300,000
26	Dinkes Prov. Bengkulu	300,000				300,000						300,000



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
27	Dinkes Prov. Maluku Utara	300,000				300,000					-	300,000
28	Dinkes Prov. Banten	300,000				300,000	14,900,000				14,900,000	15,200,000
29	Dinkes Prov. Bangka Belitung	300,000				300,000					-	300,000
30	Dinkes Prov. Gorontalo	300,000				300,000					-	300,000
31	Dinkes Prov. Kepulauan Riau	300,000				300,000					-	300,000
32	Dinkes Prov. Papua Barat	300,000				300,000					-	300,000
33	Dinkes Prov. Sulawesi Barat	300,000				300,000					-	300,000
<b>B. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA</b>		-	-	-	-	-	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,500,000
1	Dinkes Kab. Humbang Hasundutan					-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000
2	Dinkes Kota. Tangerang Selatan					-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000
3	Dinkes Kab. Delir					-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000
4	Dinkes Kab. Slicka					-	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000
<b>VII. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>		48,660,000	15,039,000	99,537,900	-	164,176,000	-	-	-	-	-	164,176,000
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	1,050,000	-	-	-	1,050,000	-	-	-	-	-	1,050,000
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	2,050,000	-	-	-	2,050,000	-	-	-	-	-	2,050,000
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2,650,000	-	-	-	2,650,000	-	-	-	-	-	2,650,000
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nangroe Aceh D.	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	1,900,000
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	2,400,000	3,087,000	20,158,500	-	25,645,500	-	-	-	-	-	25,645,500
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-	1,700,000
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	1,350,000
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-	1,300,000
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	1,500,000	4,233,000	28,122,000	-	33,855,000	-	-	-	-	-	33,855,000
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1,450,000	-	-	-	1,450,000	-	-	-	-	-	1,450,000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	1,450,000	2,038,000	13,818,000	-	17,304,000	-	-	-	-	-	17,304,000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	1,450,000	-	-	-	1,450,000	-	-	-	-	-	1,450,000
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	1,400,000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	1,450,000	-	-	-	1,450,000	-	-	-	-	-	1,450,000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-	1,300,000
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1,950,000	1,667,000	11,658,000	-	15,475,000	-	-	-	-	-	15,475,000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	1,350,000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-	1,300,000



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,250,000	1,512,000	9,966,000	-	12,728,000	-	-	-	-	-	12,728,000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,800,000	2,304,000	15,814,500	-	19,918,500	-	-	-	-	-	19,918,500
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	2,200,000	-	-	-	2,200,000	-	-	-	-	-	2,200,000
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	1,250,000
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	1,150,000	-	-	-	1,150,000	-	-	-	-	-	1,150,000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-	1,100,000
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	1,050,000	-	-	-	1,050,000	-	-	-	-	-	1,050,000
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-	1,100,000
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-	1,300,000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
VIII.	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	52,432,419	-	-	-	52,432,419	-	-	-	-	-	52,432,419
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	534,818	-	-	-	534,818	-	-	-	-	-	534,818
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	2,116,890	-	-	-	2,116,890	-	-	-	-	-	2,116,890
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	1,852,841	-	-	-	1,852,841	-	-	-	-	-	1,852,841
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	504,896	-	-	-	504,896	-	-	-	-	-	504,896
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2,403,364	-	-	-	2,403,364	-	-	-	-	-	2,403,364
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nangroe Aceh D.	2,062,366	-	-	-	2,062,366	-	-	-	-	-	2,062,366
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	2,095,807	-	-	-	2,095,807	-	-	-	-	-	2,095,807
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	1,702,000	-	-	-	1,702,000	-	-	-	-	-	1,702,000
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	2,100,120	-	-	-	2,100,120	-	-	-	-	-	2,100,120
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1,296,579	-	-	-	1,296,579	-	-	-	-	-	1,296,579
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	2,328,024	-	-	-	2,328,024	-	-	-	-	-	2,328,024
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	2,278,420	-	-	-	2,278,420	-	-	-	-	-	2,278,420
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	1,901,328	-	-	-	1,901,328	-	-	-	-	-	1,901,328
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	1,093,265	-	-	-	1,093,265	-	-	-	-	-	1,093,265
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	1,063,666	-	-	-	1,063,666	-	-	-	-	-	1,063,666
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	1,513,289	-	-	-	1,513,289	-	-	-	-	-	1,513,289
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	1,408,142	-	-	-	1,408,142	-	-	-	-	-	1,408,142
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	2,583,990	-	-	-	2,583,990	-	-	-	-	-	2,583,990
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1,733,650	-	-	-	1,733,650	-	-	-	-	-	1,733,650
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	1,696,740	-	-	-	1,696,740	-	-	-	-	-	1,696,740
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1,801,942	-	-	-	1,801,942	-	-	-	-	-	1,801,942
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	862,696	-	-	-	862,696	-	-	-	-	-	862,696
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,822,349	-	-	-	1,822,349	-	-	-	-	-	1,822,349





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12+13
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,108,054	-	-	-	2,108,054	-	-	-	-	-	2,108,054
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	1,987,179	-	-	-	1,987,179	-	-	-	-	-	1,987,179
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1,584,310	-	-	-	1,584,310	-	-	-	-	-	1,584,310
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	1,083,706	-	-	-	1,083,706	-	-	-	-	-	1,083,706
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	793,995	-	-	-	793,995	-	-	-	-	-	793,995
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	1,010,081	-	-	-	1,010,081	-	-	-	-	-	1,010,081
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	1,149,823	-	-	-	1,149,823	-	-	-	-	-	1,149,823
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1,000,975	-	-	-	1,000,975	-	-	-	-	-	1,000,975
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1,856,690	-	-	-	1,856,690	-	-	-	-	-	1,856,690
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	1,203,424	-	-	-	1,203,424	-	-	-	-	-	1,203,424
VIII.	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN</b>	<b>67,606,100</b>	-	-	-	<b>67,606,100</b>	<b>115,000,000</b>	-	-	-	<b>115,000,000</b>	<b>182,606,100</b>
1	Dinas Kesehatan DKI Jakarta	1,255,200	-	-	-	1,255,200	-	-	-	-	-	1,255,200
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	3,015,200	-	-	-	3,015,200	-	-	-	-	-	3,015,200
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	3,754,700	-	-	-	3,754,700	-	-	-	-	-	3,754,700
4	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	1,189,700	-	-	-	1,189,700	-	-	-	-	-	1,189,700
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	3,951,200	-	-	-	3,951,200	-	-	-	-	-	3,951,200
6	Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh D.	2,818,700	-	-	-	2,818,700	-	-	-	-	-	2,818,700
7	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	3,323,700	-	-	-	3,323,700	20,000,000	-	-	-	20,000,000	23,323,700
8	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2,306,700	-	-	-	2,306,700	-	-	-	-	-	2,306,700
9	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	1,648,200	-	-	-	1,648,200	-	-	-	-	-	1,648,200
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1,582,700	-	-	-	1,582,700	10,000,000	-	-	-	10,000,000	11,582,700
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	1,994,700	-	-	-	1,994,700	25,000,000	-	-	-	25,000,000	26,994,700
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1,929,200	-	-	-	1,929,200	-	-	-	-	-	1,929,200
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	1,929,200	-	-	-	1,929,200	-	-	-	-	-	1,929,200
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	1,879,200	-	-	-	1,879,200	15,000,000	-	-	-	15,000,000	16,879,200
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	2,013,700	-	-	-	2,013,700	25,000,000	-	-	-	25,000,000	27,013,700
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	1,879,200	-	-	-	1,879,200	-	-	-	-	-	1,879,200
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	2,194,700	-	-	-	2,194,700	-	-	-	-	-	2,194,700
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	1,882,700	-	-	-	1,882,700	-	-	-	-	-	1,882,700
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	2,884,200	-	-	-	2,884,200	-	-	-	-	-	2,884,200
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	1,698,200	-	-	-	1,698,200	-	-	-	-	-	1,698,200
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1,932,700	-	-	-	1,932,700	-	-	-	-	-	1,932,700
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1,451,700	-	-	-	1,451,700	-	-	-	-	-	1,451,700
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,567,200	-	-	-	1,567,200	-	-	-	-	-	1,567,200



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	PROGRAM/SATKER	DEKONSENTRASI					TUGAS PEMBANTUAN					TOTAL
		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 1	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PINJAMAN	HIBAH	JUMLAH 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 7+12
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,387,700	-	-	-	2,387,700	-	-	-	-	-	2,387,700
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	3,211,700	-	-	-	3,211,700	-	-	-	-	-	3,211,700
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1,667,200	-	-	-	1,667,200	-	-	-	-	-	1,667,200
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	1,901,700	-	-	-	1,901,700	-	-	-	-	-	1,901,700
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	1,536,200	-	-	-	1,536,200	-	-	-	-	-	1,536,200
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	1,370,700	-	-	-	1,370,700	-	-	-	-	-	1,370,700
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	1,355,200	-	-	-	1,355,200	-	-	-	-	-	1,355,200
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1,320,700	-	-	-	1,320,700	20,000,000	-	-	-	20,000,000	21,320,700
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1,582,700	-	-	-	1,582,700	-	-	-	-	-	1,582,700
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	1,189,700	-	-	-	1,189,700	-	-	-	-	-	1,189,700
	Jumlah =	452,525,649	44,189,767	204,055,274	448,520	701,219,229	1,011,600,000	21,340,900	55,070,502	13,776,424	1,101,787,826	1,803,007,055

